

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam (SDA), karena Indonesia memiliki luas wilayah yang cukup besar, terdiri dari 17.508 pulau dengan batas-batas astronomis Utara: 06 08 LU, Selatan 11 15 LS, Barat 94 45 BT, Timur 141 05 BT, dan jarak utara – selatan: + 1.888 km, barat – timur: + 5.110 km (Sumarsono dkk, 2007: 68). Menurut pengamat energi Kurtubi, cadangan di perut bumi Indonesia dalam bentuk minyak, gas, batubara, tembaga, emas, nikel, dan perak, nilainya sekitar Rp. 200 ribu triliun (liputan6.com). Nilai tersebut belum termasuk kekayaan hutan, hasil pertanian, perkebunan, dan kekayaan lainnya. Tetapi kekayaan alam yang dimiliki bangsa kita tersebut belum tentu membuat rakyat sejahtera, belum tentu membuat sumber daya manusia yang mapan, realitanya kemiskinan bangsa kita masih menunjukkan angka yang tinggi yakni per tahun 2018 mencapai 25,67 juta jiwa (bps.go.id. Diakses pada tanggal 24 Mei 2019).

Kemiskinan menurut BPS adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (bps.go.id). Kemiskinan adalah suatu keadaan yang bersifat multidimensi dan sulit didefinisikan dalam definisi tunggal. Banyak pakar dari berbagai disiplin ilmu telah mencoba mendefinisikan konsep kemiskinan, namun belum ada yang menyepakati konsep kemiskinan dalam definisi yang disepakati bersama. Perspektif yang digunakanpun beragam mulai dari perspektif ekonomi, sosiologi, hingga perspektif moralitas (Arsyad, 2015: 299). Konsep kemiskinan secara umum mendefinisikan bahwa kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau sekelompok orang dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan

seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, dan spiritual.

Berikut data kemiskinan per september 2018 menurut Badan Pusat Statistika:



(Sumber: <https://www.bps.go.id>)

Data kemiskinan di atas menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, dan pada bulan september 2018 penduduk yang mengalami kemiskinan tercatat paling rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi demikian, bukan berarti Indonesia tidak mengalami kemiskinan, meskipun tahun 2018 tingkat kemiskinan tercatat paling rendah, nyatanya angka kemiskinan bangsa kita masih berjumlah 25,67 juta jiwa.

Kondisi kemiskinan di kabupaten Blora masih dikatakan cukup tinggi, jumlah penduduk miskin di kabupaten Blora pada tahun 2018 masih mencapai 102,5 ribu orang (11,90 persen) meskipun telah mengalami penurunan dari pada tahun 2017 yang mencapai 111,9 ribu orang atau 13,04 persen (Profil Kemiskinan Blora Tahun 2018). Menurut Wakil Bupati Blora seperti dimuat dalam website resmi kabupaten Blora, bahwa kemiskinan dengan angka 11,90 persen masih dikatakan cukup tinggi, karena masih berada pada peringkat 23 dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah.

Berikut data kemiskinan kabupaten Blora 2017-2018 menurut Badan Pusat Statistika Kabupaten Blora:

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Perubahan (Rp)
(1)	(2)	(3)
2016	279 972	-
2017	291 114	11 142 (3,97 %)
2018	308 520	17 406 (5,98 %)

(Sumber: <https://blorakab.bps.go.id>)

Berdasarkan besaran Garis Kemiskinan Kabupaten Blora yang mencapai Rp 308.520,- per kapita per bulan dapat dikatakan bahwa untuk bisa memenuhi kebutuhan minimum baik kebutuhan minimum untuk makanan maupun non-makanan di Kabupaten Blora, seorang penduduk yang menetap di Kabupaten Blora membutuhkan setidaknya Rp 308.520,- per bulan atau sekitar Rp 10.284,- per hari. Atau jika dalam satu rumah tangga terdiri dari 4 orang, yaitu suami, istri dan dua orang anak, maka setidaknya rumah tangga tersebut membutuhkan sekitar Rp 1,2 juta untuk memenuhi kebutuhan minimumnya selama satu bulan (Profil Kemiskinan Blora Tahun 2018). Oleh karenanya salah satu upaya pemerintah untuk menangani kemiskinan adalah dengan cara memberikan bantuan sosial, baik bantuan sosial tunai maupun berupa non tunai. Salah satu program bantuan sosial yang telah dan sedang dilakukan pemerintah lakukan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (pkh.kemsos.go.id).

Hadirnya program PKH, masyarakat khususnya keluarga miskin diharapkan dapat mengakses dengan mudah terhadap sarana pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup khususnya keluarga miskin. Hal ini sejalan dengan PERMENSOS Nomor 10 Tahun 2017 pasal (2) poin (a) yang berbunyi: PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian dijelaskan pula

dalam pasal (2) poin (c) bahwa PKH bertujuan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. Dari undang-undang di atas dapat kita ketahui bahwa sasaran utama dari program PKH ialah untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, sehingga masyarakat diharapkan dapat memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Secara garis besar dari pemaparan tentang PKH di atas dapat kita ketahui bahwa fokus tujuan dari diadakannya PKH ialah terdapat tiga hal utama, yaitu pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Kementerian Keuangan mencatat penyaluran belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp70,49 triliun per semester I 2019, realisasi tersebut berkisar 72,63 persen dari pagu APBN 2019 yang mencapai Rp97,06 triliun (cnnindonesia.com). Bentuk belanja sosial tersebut direalisasikan melalui pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah mencapai Rp26,9 triliun atau 82,4 persen dari alokasinya (cnnindonesia.com). Dari data tersebut, secara matematis dapat diketahui bahwa program PKH adalah satu-satunya program bantuan sosial yang menyerap anggaran terbanyak dibanding bantuan lainnya, yakni mencapai 82,4 persen. Penulis juga menemukan fenomena tentang PKH di masyarakat bahwa bantuan PKH ini merupakan program yang memberi bantuan paling banyak, masyarakat setiap tiga bulan sekali mendapatkan pencairan bantuan, kemudian dari PKH ini masyarakat juga dapat mengakses layanan bantuan lainnya seperti Bantuan Beras Sejahtera, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan fenomena tersebut. Apakah adanya bantuan PKH, taraf hidup masyarakat juga mengalami peningkatan, khususnya pendidikan anak-anak dari keluarga penerima manfaat PKH. Apa saja nilai-nilai yang dipegang masyarakat dalam menentukan pilihannya untuk meningkatkan sarana belajar anaknya.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa manfaat dana PKH dalam peningkatan sarana belajar anak sekolah dasar di Kelurahan Wulung?

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa manfaat dana PKH dalam peningkatan sarana belajar anak sekolah dasar di Kelurahan Wulung.

1.4 Manfaat

1. Secara teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu sosiologi, dan dapat memberikan gagasan baru yang lebih luas dalam keilmuan sosiologi, khususnya dalam perkembangan teori pilihan rasional James S. Coleman.
 - b. Bagi perguruan tinggi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dapat menjadi wacana dalam kajian teori-teori pilihan rasional khususnya dalam penggunaan teori untuk menangani problem pendidikan.
2. Secara praktis, antara lain :
 - a. Memberikan pengetahuan bahwa penambahan bantuan PKH memiliki dampak positif tetapi juga terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya sehingga dapat menjadi evaluasi dalam pelaksanaan PKH.
 - b. Memberikan sedikit cakrawala keilmuan dalam perkembangan teori pilihan rasional khususnya penerapannya dalam penanganan problem yang ada di masyarakat.